

**MENGINTEGRASIKAN NILAI ISLAM DALAM KURIKULUM PERGURUAN
TINGGI: MEKANISME, GOVERNANCE, DAN PEMBELAJARAN
TRANSFORMATIF – SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW**

¹Patoni, ²Aries Rapelianto, ³Sany Rahmah Padilah

⁴Yudi Prayitno, ⁵Ade Tutty R. Rosa, ⁶Agus Mulyanto
^{1,2,3,4 5,6} Universitas Islam Nusantara

¹ febpatoni@gmail.com, ² ariesrapelianto@gmail.com ³
sany.rahmah.padilah@gmail.com

⁴ yudiprayitno90@gmail.com, ⁵ atrosa1957@gmail.com ⁶
agusmulyanto@uninus.ac.id

ABSTRACT

The integration of Islamic values in the higher education curriculum is a complex epistemological and institutional challenge that requires a systemic and thoughtful approach in the era of modern higher education that is increasingly global. This research aims to explore four main dimensions: (1) how Islamic values can be integrated without sacrificing academic rigor and international standards; (2) mechanisms that facilitate or hinder implementation in classroom learning and the role of academic agencies; (3) institutional governance, academic leadership, and stakeholder collaboration; and (4) contribution to transformative learning and ethical-spiritual development of students. The method used was a systematic literature review with the PRISMA 2020 protocol, analyzing 32 articles out of 121 articles screened, sourced from the Scopus database. The results show that effective integration requires simultaneous transformation at four levels of the organization (institutional, programmatic, pedagogical, and personal), strong academic agency with a sense of ownership, coordinated governance with adequate resource allocation, and active collaboration with religious communities. The integration of Islamic values can produce meaningful learning outcomes in employability, civic engagement, and citizenship development without sacrificing academic standards. In conclusion, the integration of Islamic values in the higher education curriculum is possible and beneficial when supported by a systemic approach, clear leadership, professional development of lecturers, and adequate allocation of resources.

Keywords: *integration of Islamic values, higher education curriculum reform, institutional governance, transformative learning, academic agency, meaningful learning outcomes*

ABSTRAK

Integrasi nilai-nilai Islam dalam kurikulum pendidikan tinggi merupakan tantangan epistemologis dan institusional yang kompleks yang memerlukan pendekatan sistemik dan thoughtful dalam era pendidikan tinggi modern yang semakin global. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi empat dimensi utama: (1) bagaimana nilai-nilai Islam dapat diintegrasikan tanpa mengorbankan rigor akademik dan standar internasional; (2) mekanisme yang memfasilitasi atau menghambat implementasi dalam pembelajaran di kelas dan peran agensi akademik; (3) governance institusional, kepemimpinan akademik, dan kolaborasi stakeholder;

serta (4) kontribusi terhadap pembelajaran transformatif dan pengembangan etika-spiritual siswa. Metode yang digunakan adalah systematic literature review dengan protokol PRISMA 2020, menganalisis 32 artikel dari 121 artikel yang diskriming, yang bersumber dari database Scopus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi efektif memerlukan transformasi simultan di empat level organisasi (institusional, program, pedagogis, dan personal), agensi akademik yang kuat dengan sense of ownership, governance yang terkoordinasi dengan alokasi sumber daya memadai, dan kolaborasi aktif dengan komunitas religius. Integrasi nilai-nilai Islam dapat menghasilkan learning outcomes bermakna dalam employability, civic engagement, dan citizenship development tanpa mengorbankan standar akademik. Kesimpulannya, integrasi nilai-nilai Islam dalam kurikulum pendidikan tinggi adalah possible dan bermanfaat ketika didukung oleh pendekatan sistemik, kepemimpinan yang jelas, pengembangan profesional dosen, serta alokasi sumber daya yang memadai.

Kata Kunci: integrasi nilai Islam, reforma kurikulum pendidikan tinggi, governance institusional, pembelajaran transformatif, agensi akademik, learning outcomes bermakna

A. Pendahuluan

Reforma kurikulum dalam pendidikan tinggi telah menjadi fokus utama kebijakan pendidikan global dalam dua dekade terakhir, terutama dalam merespons dinamika perubahan ekonomi, sosial, dan teknologi yang cepat dan kompleks. Annala dan Mäkinen (2016) menekankan bahwa kurikulum harus dipahami sebagai suatu proses yang mencerminkan nilai-nilai fundamental, kepercayaan, dan prinsip-prinsip yang berkaitan dengan pembelajaran, pemahaman, pengetahuan, dan disiplin ilmu, serta interpretasi tentang tujuan pendidikan tinggi itu sendiri. Dengan demikian, kurikulum tidak hanya sekadar dokumen tekstual tetapi merupakan hasil dari negosiasi

iteratif dan perencanaan aksi di antara berbagai pemangku kepentingan akademis yang memiliki kepentingan dan interpretasi berbeda terhadap makna dan arah pendidikan. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa reforma kurikulum melibatkan negosiasi kompleks antara aktor akademis, institusi, dan kebijakan, yang seringkali menghadapi tension antara mempertahankan tradisi dengan mengejar inovasi, serta berbagai hambatan implementasi yang bersifat kontekstual (Annala et al., 2020). Sementara literatur internasional telah mengeksplorasi berbagai dimensi reforma kurikulum—termasuk integrasi kompetensi digital, pembelajaran berkelanjutan, inklusi, dan keadilan sosial—relatif sedikit

penelitian yang secara khusus mengarahkan perhatian pada integrasi nilai-nilai religius, khususnya nilai-nilai Islam, dalam kurikulum pendidikan tinggi. Penelitian ini berusaha untuk mengisi celah tersebut dengan mengeksplorasi bagaimana nilai-nilai Islam dapat diintegrasikan secara bermakna ke dalam kurikulum pendidikan tinggi, suatu pertanyaan yang menjadi semakin relevan dalam konteks Indonesia dengan populasi Muslim terbesar di dunia dan tradisi pendidikan tinggi Islam yang kaya. Relevansi penelitian ini semakin diperkuat oleh pengakuan global bahwa transformasi pendidikan tidak dapat dipahami sebagai proses linear atau teknis sederhana, melainkan memerlukan perubahan fundamental di berbagai level institusi, program, dan pedagogi (Clifford & Montgomery, 2014). Dengan demikian, penelitian tentang integrasi nilai-nilai Islam dalam kurikulum pendidikan tinggi tidak hanya penting untuk konteks Indonesia tetapi juga berkontribusi pada pemahaman global tentang bagaimana nilai-nilai lokal dan religius dapat diintegrasikan dalam pendidikan tinggi kontemporer.

Transformasi pendidikan yang bermakna memerlukan pemahaman mendalam tentang bagaimana perubahan dapat terjadi di berbagai tingkatan institusional dan bagaimana agensi akademik membentuk proses perubahan tersebut. Clifford dan Montgomery (2014) menganalisis pembelajaran transformatif melalui internasionalisasi kurikulum dan menemukan bahwa transformasi sejati memerlukan perubahan fundamental dalam perspektif personal dan sosial baik siswa maupun staf akademis di semua tingkat institusi pendidikan. Mereka mengidentifikasi empat level perubahan yang saling terkait: level institusional di mana keputusan ideologi tentang atribut lulusan dan kurikulum dibuat; level program di mana guru menginterpretasi kebijakan dan aktivis memperjuangkan perubahan; level pedagogis di mana guru mengontrol perubahan dalam pedagogi kelas mereka; dan level personal di mana perubahan perspektif individu menjadi prasyarat untuk tindakan sosial yang lebih luas. Kerangka kerja ini memberikan wawasan bahwa integrasi nilai-nilai Islam dalam kurikulum memerlukan lebih dari sekadar penambahan

konten atau modul terisolasi; sebaliknya, hal tersebut menuntut transformasi sistemik dalam pemahaman institusional tentang tujuan pendidikan, pedagogi pengajaran, dan identitas profesional akademisi. Penelitian lebih mendalam tentang bagaimana perubahan kurikulum benar-benar diimplementasikan mengungkapkan pentingnya peran agensi akademik dalam proses tersebut. Annala dan Mäkinen (2016) meneliti pengalaman 25 akademisi dalam proses reforma kurikulum universitas luas dan menemukan bahwa negosiasi makna dalam komunitas praktik lokal dapat dikategorikan ke dalam narasi dialogis dan narasi reproduktif. Narasi dialogis mencerminkan akademisi yang secara aktif terlibat dalam menegosiasikan dan membentuk kembali perubahan kurikulum dengan cara yang bermakna bagi mereka, sering kali menghubungkan perubahan dengan penelitian mereka dan aspirasi akademis yang lebih luas, sementara narasi reproduktif mencerminkan akademisi yang melihat perubahan kurikulum sebagai sesuatu yang mengarahkan kepada mereka dari atas tanpa kesempatan untuk meaningful negotiation.

Penelitian lanjutan oleh Annala et al. (2020) menggunakan konsep Bourdieu tentang field, habitus, dan capital untuk menganalisis bagaimana agensi akademik berevolusi selama reforma kurikulum tiga tahun, menemukan dua narasi utama: yang pertama mencerminkan perubahan agensi—ditandai dengan perspektif transformatif dan divided—dan yang kedua mengilustrasikan stabilitas agensi, yang menggambarkan tema-tema development-oriented dan resistance. Temuan ini menunjukkan bahwa integrasi nilai-nilai Islam dalam kurikulum akan sangat bergantung pada kemampuan institusi untuk menciptakan ruang bagi akademisi untuk secara aktif terlibat dalam negosiasi tentang bagaimana nilai-nilai tersebut seharusnya dipahami dan diimplementasikan, daripada hanya menerima direktif dari atas.

Sementara itu, penelitian tentang implementasi reforma kurikulum mengungkapkan bahwa kesenjangan antara desain kurikulum dan implementasi aktual di kelas sering kali sangat signifikan. Dracup et al. (2018) dalam pengembangan praktik kurikulum inklusi di Deakin University di Australia menemukan bahwa meskipun ada inisiatif

grassroots yang positif untuk mengembangkan kurikulum yang lebih inklusif, perubahan berkelanjutan memerlukan lebih dari sekadar upaya grassroots; hal tersebut memerlukan dukungan institusional, perubahan struktural, dan penyesuaian terhadap sistem insentif akademik. Mendonça et al. (2016) melakukan studi kasus pada Universidad Eduardo Mondlane di Mozambique tentang pengenalan pendekatan pembelajaran berpusat siswa dalam reforma kurikulum dan menemukan bahwa meskipun reforma kurikulum dimulai dengan visi yang jelas untuk mengubah dari pendekatan berpusat guru ke pendekatan berpusat siswa, dosen tidak merasa memiliki (lack of ownership) terhadap reforma tersebut, mengekspresikan kebutuhan untuk pelatihan dan kondisi material yang lebih baik untuk implementasi yang efektif, sementara faktor-faktor kontekstual seperti ukuran kelas yang besar, kurangnya fasilitas, dan falta dari budaya akademik yang mendukung pembelajaran dialogis menghambat implementasi pendekatan baru. Pengalaman serupa ditemukan dalam penelitian tentang kebutuhan pelatihan guru di

polytechnics Ghana: Bakah et al. (2011) meneliti kebutuhan pelatihan dan pengembangan profesional guru dalam konteks reforma kurikulum dan menemukan bahwa guru melihat industrial attachment (magang industri) sebagai kebutuhan pelatihan profesional utama untuk tetap update dengan perkembangan industri, serta guru menginginkan keterlibatan yang lebih besar dalam proses desain kurikulum dan menyatakan bahwa peningkatan pengetahuan subjek mereka akan memberi mereka kepercayaan diri untuk berpartisipasi lebih penuh dalam redesign kurikulum. Wawasan ini sangat relevan untuk integrasi nilai-nilai Islam, karena hal itu menunjukkan bahwa keberhasilan akan sangat bergantung pada kesiapan akademis, budaya institusional yang mendukung, dan alokasi sumber daya yang memadai.

Dalam konteks integrasi nilai-nilai dalam kurikulum, penelitian tentang pengembangan dan evaluasi kurikulum pendidikan moderasi agama di Ponorogo State Islamic Institute di Indonesia (Mukhibat et al., 2024) memberikan wawasan yang sangat berharga. Studi ini, yang melibatkan 18 dosen dan 97 siswa

melalui Focus Group Discussions, wawancara, dan observasi, mengembangkan kurikulum yang menambahkan satu mata kuliah 2-kredit tentang Moderasi Islam dan Keagamaan ke dalam struktur kurikulum yang total 146 kredit. Penelitian ini menemukan bahwa siswa mencapai peningkatan signifikan dalam pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk memupuk moderasi, toleransi, dan pemahaman budaya, dengan skor evaluasi mencapai 81,9. Meskipun demikian, studi ini juga mengungkapkan akar kompleks intoleransi dalam sistem pendidikan Indonesia dan menekankan perlunya keterlibatan masyarakat yang lebih luas untuk mempromosikan nilai-nilai moderasi dan saling menghormati. Penelitian ini menunjukkan bahwa integrasi nilai-nilai religius ke dalam kurikulum adalah possible dan dapat mencapai hasil pembelajaran yang positif, namun hal tersebut juga memerlukan desain yang cermat, alokasi sumber daya yang memadai, dan komitmen institusional yang berkelanjutan.

Pemahaman tentang bagaimana nilai-nilai dapat diintegrasikan dalam kurikulum juga diperkaya oleh

penelitian tentang dimensi global dalam reforma kurikulum. Franco et al. (2018) melakukan studi multi-regional tentang Higher Education for Sustainable Development (HEfSD) dan menemukan bahwa sambil fokus pada sustainability targets adalah penting, sering kali terdapat kesenjangan signifikan dalam coverage, khususnya dalam SDG yang berkaitan dengan dimensi sosial dan keadilan (SDG 1, 2, 3, dan 10). Mereka juga menemukan bahwa integrasi SDGs yang efektif memerlukan pendekatan governance yang terkoordinasi, bukan hanya inisiatif terisolasi. Lozano dan Barreiro-Gen (2019) dalam survei mereka terhadap institusi pendidikan tinggi Eropa menemukan bahwa isu-isu sosial paling kurang diintegrasikan dalam pengajaran sustainability (18% dibandingkan 27% untuk dimensi lainnya), dan bahwa tingkat pendidikan akademisi dan jenis institusi memiliki dampak pada sejauh mana dimensi sustainability diajarkan secara komprehensif. Temuan ini menunjukkan bahwa integrasi nilai-nilai dalam kurikulum memerlukan lebih dari sekadar penambahan konten; hal tersebut memerlukan transformasi sistemik dalam

governance kurikulum, pengembangan kapasitas akademik, dan pergeseran dalam ekosistem insentif institusional.

Dimensi dekolonisasi dan keadilan epistemik juga menjadi penting dalam konteks integrasi nilai-nilai lokal atau religius dalam pendidikan tinggi. Asante (2020) mengadvokasi untuk kurikulum Afrika yang transformatif dan menunjukkan bahwa struktur pendidikan yang ada didominasi oleh Pan European Academy yang memarginalkan pengetahuan dan perspektif Afrika, menyatakan kebutuhan untuk reorientasi Afrocentric dari kurikulum untuk merebut kembali agensi Afrika dan menantang model pendidikan Eurocentric. Ebewo dan Sirayi (2018) memeriksa proses transformasi kurikulum di Tshwane University of Technology di Afrika Selatan pasca-apartheid dan menemukan bahwa meskipun ada upaya untuk mengintegrasikan konten berorientasi Afrika, kurikulum masih jenuh dengan Eurocentrism dan banyak staf departemen masih setuju tentang kebutuhan untuk konten Afrika, namun ada tension antara konten lokal, continental, dan global yang belum sepenuhnya terselesaikan. Di

Indonesia khususnya, Setiyo et al. (2020) mengusulkan model alternatif untuk pengembangan kurikulum dalam pendidikan vokasional tinggi yang lebih akuntabel dan tertelusuri, mengintegrasikan standar pemerintah sambil meningkatkan akuntabilitas dan mempertimbangkan pentingnya bijaksana lokal (local wisdom) untuk memastikan bahwa lulusan dapat mengembangkan sumber daya lokal dan sesuai dengan sikap dan nilai-nilai Indonesia. Pengakuan eksplisit tentang pentingnya bijaksana lokal dan nilai-nilai nasional dalam pengembangan kurikulum menunjukkan bahwa ada ruang yang semakin diakui dalam discourse pendidikan untuk mengintegrasikan nilai-nilai lokal, termasuk nilai-nilai religius.

Pembelajaran transformatif dan pengembangan pembelajaran yang bermakna juga menjadi dimensi penting dalam integrasi nilai-nilai dalam kurikulum. Clifford dan Montgomery (2014) menemukan bahwa peserta dalam kursus tentang internasionalisasi kurikulum mengembangkan dua perspektif yang berbeda tentang tujuan akhir dari pembelajaran transformatif: beberapa melihat tujuan akhir sebagai siswa

menjadi active global citizens yang peduli dan mengambil tindakan mengenai ideals seperti justice, equality, dan social responsibility, sementara yang lain merasa lebih nyaman dengan endpoint sebagai siswa menjadi cosmopolitan learners—melek terhadap isu-isu global dan mampu berempati dengan perspektif orang lain tetapi tanpa agenda yang harus mengambil tindakan berdasarkan sekumpulan nilai universal. Penelitian ini menunjukkan bahwa ada tension antara pembelajaran yang inklusif dan pembelajaran yang transformatif, dan bahwa beberapa staf khawatir tentang etika "tamper dengan 'world view' peserta tanpa izin mereka." Wawasan ini relevan untuk integrasi nilai-nilai Islam karena menunjukkan bahwa perlu ada kejelasan tentang tujuan pembelajaran transformatif dan dialog yang terbuka tentang bagaimana nilai-nilai religius berkontribusi pada tujuan-tujuan tersebut.

Dalam konteks employability dan integrasi nilai-nilai dalam kurikulum, penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai yang lebih luas berkontribusi signifikan pada kesuksesan karir jangka panjang. Chen et al. (2025) dalam penelitian tentang dampak

integrasi industri-pendidikan pada kualitas pekerjaan di perguruan tinggi vokasi tinggi China menemukan hubungan yang nonlinear, di mana tingkat integrasi optimal meningkatkan kualitas ketenagakerjaan tetapi integrasi yang berlebihan dapat menghambatnya, menunjukkan bahwa kualifikasi staf pengajar dan kapasitas pengembangan kurikulum memiliki efek moderasi negatif pada hubungan ini, menyarankan bahwa integrasi industri-pendidikan yang efektif memerlukan lebih dari sekadar proximity dengan industri; hal tersebut memerlukan capacity akademik yang kuat dan struktur kurikulum yang thoughtfully designed. Magadza (2026) melakukan studi multi-stakeholder kualitatif tentang bagaimana reforma kurikulum, pengembangan dosen, dan employabilitas lulusan berinteraksi dalam konteks university Afrika Selatan yang beradaptasi dengan kebutuhan Revolusi Industri Keempat, melibatkan 60 peserta yang terdiri dari siswa, dosen, administrator universitas, dan pemberi kerja industri, menemukan bahwa banyak kurikulum universitas tetap kedaluwarsa dan tidak cukup sejalan dengan kebutuhan 4IR, bahwa

pengembangan dosen muncul sebagai kebutuhan strategis karena capacity untuk pedagogic innovation sering terhambat oleh constraint struktural, dan bahwa integrasi keterampilan digital dan soft skills dalam kurikulum tidak memadai, serta bahwa perlu balanced curriculum yang mendukung work-readiness, academic integrity, dan civic engagement. Temuan ini menunjukkan bahwa employability yang sesungguhnya bukan hanya tentang keterampilan teknis tetapi tentang pengembangan etika, integritas, dan tanggungjawab sosial, yang mengimplikasikan bahwa nilai-nilai etika dan sosial harus terintegrasi dalam keseluruhan kurikulum.

Peran kolaborasi lintas budaya dan kemitraan dalam implementasi reforma kurikulum juga menjadi penting untuk memastikan keberhasilan integrasi nilai-nilai dalam kurikulum. Wimpenny et al. (2019) mengeksplorasi penggunaan Open Educational Practices (OEP) di institusi pendidikan tinggi di Mediterania Selatan, dengan fokus pada kemitraan lintas budaya dan interkultur, menemukan bahwa adopsi OEP sangat tergantung pada konteks budaya dan bahwa pendekatan

instructor-centered versus learner-centered berbeda secara signifikan di berbagai region, menunjukkan pentingnya sensitivitas budaya dalam implementasi inovasi kurikulum. Lewis et al. (2016) mengeksplorasi peran pendidikan lapangan dalam kemitraan universitas-komunitas yang ditujukan untuk transformasi kurikulum dalam program Master of Social Work dan menemukan bahwa ketika dirancang dengan cermat, kemitraan universitas-komunitas dapat meningkatkan relevansi kurikulum dan memfasilitasi hasil pembelajaran yang lebih baik bagi siswa dan klien, namun kemitraan tersebut juga menghadapi challenges seperti time constraints, differing priorities antara academia dan komunitas partners, dan kebutuhan untuk structured protocols dan frameworks untuk implementasi yang efektif.

Dengan mempertimbangkan kompleksitas reforma kurikulum, pentingnya agensi akademik, tantangan implementasi di berbagai konteks, dan pentingnya kolaborasi yang thoughtfully designed dengan stakeholder eksternal, penelitian tentang integrasi nilai-nilai Islam dalam kurikulum pendidikan tinggi menjadi sangat penting dan relevan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi empat dimensi utama: (1) bagaimana nilai-nilai religius (khususnya Islam) dapat diintegrasikan ke dalam struktur kurikulum pendidikan tinggi tanpa mengorbankan rigor akademik, standar internasional, dan integritas disiplin ilmu; (2) mekanisme spesifik yang memfasilitasi atau menghambat implementasi nilai-nilai religius dalam pembelajaran dan pengajaran di kelas, serta bagaimana agensi akademik membentuk proses integrasi tersebut; (3) bagaimana governance institusional, kepemimpinan akademik, dan kolaborasi dengan komunitas religius dan stakeholder eksternal memfasilitasi atau menghambat integrasi nilai-nilai Islam dalam kurikulum pendidikan tinggi; dan (4) bagaimana integrasi nilai-nilai religius dalam kurikulum pendidikan tinggi berkontribusi pada transformative learning, pengembangan etika dan spiritual siswa, serta learning outcomes yang bermakna, khususnya dalam konteks employability, civic engagement, dan citizenship development. Dengan mengeksplorasi pertanyaan-pertanyaan penelitian ini melalui

systematic literature review, penelitian ini diharapkan dapat mengisi celah signifikan dalam literatur tentang integrasi nilai-nilai religius dalam pendidikan tinggi dan memberikan insights yang valuable untuk institusi pendidikan tinggi baik di Indonesia maupun di konteks global yang berusaha untuk mengintegrasikan nilai-nilai lokal dan religius dalam kurikulum mereka dengan cara yang efektif, bermakna, dan berkelanjutan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain systematic literature review (SLR) yang mengikuti protokol Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA) 2020 untuk memastikan transparansi, replicability, dan kualitas metodologi penelitian. Systematic literature review dipilih sebagai desain penelitian karena metode ini memungkinkan analisis sistemik terhadap berbagai studi empiris dan konseptual yang telah dilakukan mengenai reforma kurikulum, integrasi nilai-nilai dalam pendidikan, transformasi pedagogis, dan pembelajaran transformatif dalam pendidikan tinggi, dengan fokus khusus pada identifikasi mekanisme,

hambatan, dan fasilitator yang mungkin relevan untuk integrasi nilai-nilai Islam dalam kurikulum pendidikan tinggi. Prosedur pencarian literatur dilakukan melalui database Scopus menggunakan kombinasi kata kunci berikut: "Higher Education Curriculum Reform," "University Curriculum Transformation," "Future Higher Education Curriculum," "Transformative Higher Education Curriculum," "Higher Education Curriculum Development," dan "Competency Based Higher Education Curriculum," yang menghasilkan 153 artikel dalam fase identifikasi awal. Dari 153 artikel yang teridentifikasi, setelah penghapusan duplikat (n=4), penandaan sebagai tidak layak oleh automation tools tahun 2010-2026 (n=23), dan penghapusan untuk alasan lain berdasarkan tier Q1, Q2, Q3, Q4 (n=15), serta penghapusan satu artikel tanpa abstrak, tersisa 121 artikel yang diskriminasi. Pada tahap screening, semua 121 artikel direviu sepenuhnya, menghasilkan pengecualian 0 artikel sehingga 121 artikel melanjutkan ke fase pengambilan laporan. Pada tahap ini, dari 121 artikel yang dicari untuk diambil, 83 artikel tidak berhasil diakses atau

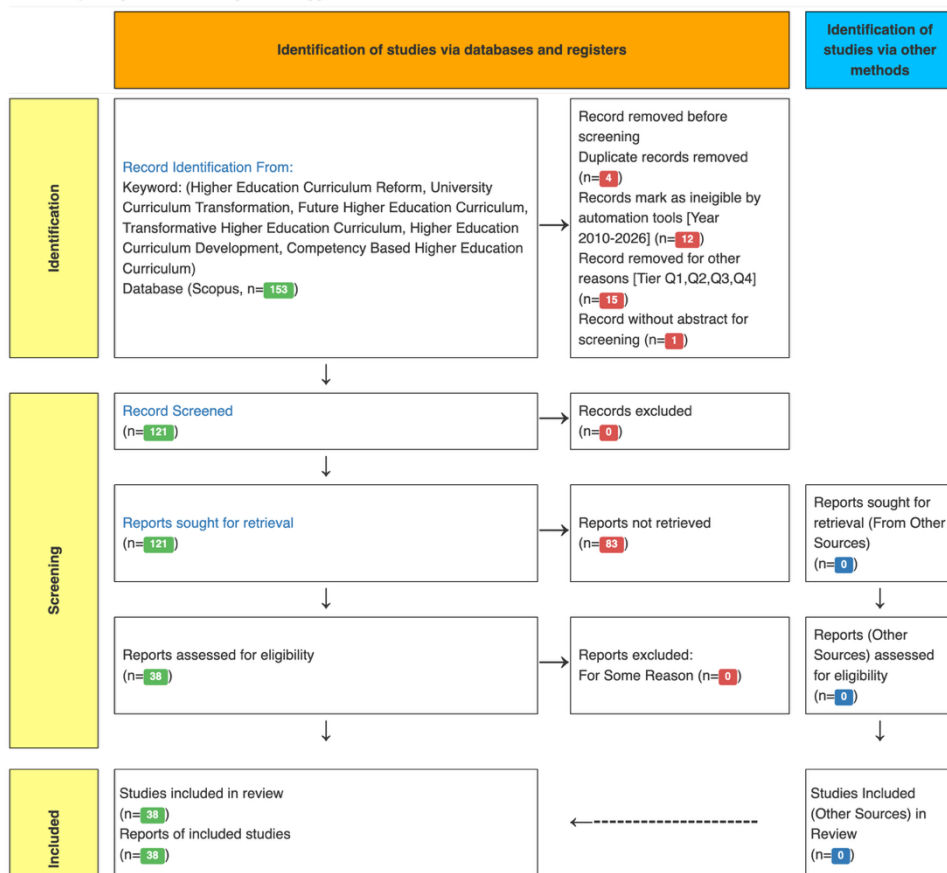
diunduh karena kendala akses, lisensi, atau ketersediaan, sehingga hanya 38 artikel yang tersedia untuk penilaian kelayakan. Dari 38 artikel yang dinilai kelayakannya, semua 38 diidentifikasi sebagai layak untuk diinklusikan dalam review berdasarkan kriteria eligibility yang telah ditetapkan (fokus pada reforma kurikulum, transformasi pendidikan, implementasi nilai-nilai, pembelajaran, atau governance institusional dalam pendidikan tinggi). Namun, dalam fase akhir pengumpulan data lengkap untuk analisis mendalam, hanya 32 dari 38 artikel berhasil diakses sepenuhnya untuk ekstraksi data komprehensif dan analisis tematik menyeluruh.

Ekstraksi data dari 32 artikel ini dilakukan menggunakan format standardisasi yang mencakup: penulis dan tahun publikasi, negara/konteks penelitian, desain metodologi yang digunakan, fokus penelitian utama, dan temuan-temuan kunci.

Analisis data dilakukan menggunakan pendekatan analisis tematik iteratif untuk mengidentifikasi tema-tema yang berulang, mekanisme-mekanisme yang memfasilitasi atau menghambat implementasi nilai-nilai dalam

serta kontribusi integrasi nilai-nilai terhadap learning outcomes transformatif dan pengembangan etika siswa. Sintesis hasil penelitian difokuskan pada empat dimensi utama yang sesuai dengan research questions: (1) pendekatan epistemologis dan desain kurikulum yang mengintegrasikan nilai-nilai dengan rigor akademik, (2) mekanisme implementasi dan tantangan kontekstual, (3) governance institusional dan kepemimpinan akademik, serta (4)

Prisma Reporting: Kurikulum Perguruan Tinggi



Generate From Watase Uake Tools, based on Prisma 2020 Reporting

kurikulum, peran governance institusional dan agensi akademik,

kontribusi terhadap pembelajaran

transformatif dan pengembangan siswa yang holistik.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

HASIL PENELITIAN

1. Integrasi Epistemologis – Nilai-Nilai Religius dalam Struktur Kurikulum Tanpa Mengorbankan Rigor Akademik dan Standar Internasional

Pertanyaan penelitian pertama mengeksplorasi dimensi epistemologis tentang bagaimana nilai-nilai religius Islam dapat diintegrasikan ke dalam struktur kurikulum pendidikan tinggi sambil mempertahankan rigor akademik, standar internasional, dan integritas disiplin ilmu. Literatur yang ditelaah menunjukkan bahwa integrasi nilai-nilai religius bukan sekadar penambahan konten atau modul terisolasi, melainkan memerlukan transformasi fundamental dalam pemahaman institusional tentang sifat pengetahuan, akses epistemik, dan landasan ontologis dari proses pembelajaran itu sendiri (Shay, 2015; Clifford & Montgomery, 2014). Penelitian Shay (2015) mengungkapkan bahwa kurikulum dibangun atas pilihan epistemologis mendalam tentang apakah basis

pencapaian adalah "knower code" (siapa Anda) atau "knowledge code" (apa dan bagaimana Anda mengetahui), dan pilihan-pilihan ini sangat mempengaruhi bagaimana nilai-nilai dikonseptualisasikan dan diintegrasikan dalam kurikulum. Studi Clifford dan Montgomery (2014) tentang pembelajaran transformatif melalui internasionalisasi kurikulum mengidentifikasi bahwa transformasi sejati memerlukan perubahan fundamental pada empat level organisasi secara simultan: level institusional di mana keputusan ideologi tentang atribut lulusan dibuat; level program di mana guru menginterpretasi kebijakan; level pedagogis di mana guru mengontrol perubahan dalam pedagogi kelas; dan level personal di mana perubahan perspektif individu menjadi prasyarat untuk tindakan sosial yang lebih luas. Temuan ini menunjukkan bahwa integrasi nilai-nilai Islam harus melibatkan transformasi sistemik di semua level ini secara bersamaan, bukan hanya pada satu level saja. Penelitian tentang pendekatan berbasis ontologi untuk manajemen kurikulum (Piriyapongpipat et al., 2024) menunjukkan bahwa teknologi dan struktur manajemen yang tepat

dapat mendukung integrasi nilai-nilai sambil mempertahankan fleksibilitas dan integritas disiplin ilmu, dengan sistem seperti ini mampu mencapai precision 83.14% dan recall 84.84% dalam merepresentasikan komponen kurikulum yang kompleks. Penelitian Angelaki et al. (2024) tentang integrasi sustainability dalam kurikulum ICT menunjukkan bukti empiris konkret bahwa nilai-nilai dapat diintegrasikan secara bermakna tanpa mengorbankan kualitas akademik, dengan siswa menunjukkan peningkatan signifikan dalam pengetahuan sustainability (dari pre-test 3.40 ± 0.68 ke post-test 4.08 ± 0.71 , dengan effect size Cohen's $d=1$ yang dianggap large) dan juga mengembangkan "intention to engage" dengan isu-isu sustainability. Model ini menunjukkan bahwa integrasi nilai-nilai religius Islam dapat dirancang dengan cara yang serupa—melalui desain pedagogis yang cermat, learning outcomes yang jelas, dan metode pengajaran yang membuat nilai-nilai tersebut relevan dengan pengalaman hidup siswa dan aspirasi profesional mereka. Dalam konteks Indonesia khususnya, penelitian Setiyo et al. (2020) mengusulkan model pengembangan

kurikulum yang mengintegrasikan standar pemerintah sambil mempertahankan akuntabilitas dan mengakomodasi "local wisdom" Indonesia, menunjukkan bahwa ada ruang yang semakin diakui dalam discourse pendidikan untuk mengintegrasikan nilai-nilai lokal, termasuk nilai-nilai religius, dalam kurikulum pendidikan tinggi. Pengakuan eksplisit ini memberikan fondasi yang kuat untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam secara sistematis dalam pembelajaran akademik di berbagai disiplin ilmu.

2. Mekanisme Implementasi dan Agensi Akademik – Fasilitator dan Hambatan dalam Pembelajaran dan Pengajaran di Kelas

Dimensi kedua dari pertanyaan penelitian ini fokus pada mekanisme spesifik yang memfasilitasi atau menghambat implementasi nilai-nilai religius dalam pembelajaran dan pengajaran di kelas, serta peran agensi akademik dalam membentuk proses integrasi tersebut. Literatur yang ditelaah mengungkapkan konsistensi yang mencolok dalam menemukan bahwa kesenjangan antara desain kurikulum dan

implementasi aktual di kelas sangat signifikan, dan keberhasilan implementasi sangat bergantung pada agensi akademik dan sense of ownership yang dirasakan oleh pengajar terhadap reforma kurikulum (Mendonça et al., 2016; Dracup et al., 2018; Annala & Mäkinen, 2016). Penelitian Mendonça et al. (2016) di Eduardo Mondlane University Mozambique menemukan bahwa meskipun reforma kurikulum dimulai dengan visi yang jelas untuk mengubah dari pendekatan berpusat guru ke pendekatan berpusat siswa, dosen tidak merasa memiliki reforma tersebut (lack of ownership), mengekspresikan kebutuhan untuk pelatihan komprehensif dan kondisi material yang lebih baik untuk implementasi yang efektif, sementara faktor-faktor kontekstual seperti ukuran kelas yang besar, kurangnya fasilitas, dan ketiadaan budaya akademik yang mendukung pembelajaran dialogis menghambat implementasi pendekatan pembelajaran baru. Penelitian lanjutan dari Annala dan Mäkinen (2016) tentang communities of practice dalam reforma kurikulum mengidentifikasi dua jenis narasi dalam discourse akademik: narasi

dialogis yang mencerminkan akademisi yang secara aktif terlibat dalam menegosiasikan dan membentuk kembali perubahan kurikulum dengan cara yang bermakna bagi mereka, seringkali menghubungkan perubahan dengan penelitian dan aspirasi akademis mereka; dan narasi reproduktif yang mencerminkan akademisi yang melihat perubahan kurikulum sebagai sesuatu yang mengarahkan kepada mereka dari atas tanpa kesempatan untuk meaningful negotiation. Perbedaan ini sangat penting karena narasi dialogis dikaitkan dengan pembelajaran yang lebih bermakna, inovasi pedagogi yang lebih besar, dan keterlibatan siswa yang lebih tinggi. Penelitian lanjutan Annala et al. (2020) menggunakan konsep Bourdieu tentang field, habitus, dan capital untuk menganalisis evolusi agensi akademik selama reforma kurikulum tiga tahun, menemukan bahwa agensi akademik tidak statis tetapi berevolusi selama proses reforma, dengan dua narasi utama: narasi perubahan agensi yang ditandai dengan perspektif transformatif dan divided, serta narasi stabilitas agensi yang menggambarkan tema-tema

development-oriented dan resistance. Penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi akademisi tentang capital mereka (keterampilan, pengetahuan, status) mempengaruhi bagaimana mereka menegosiasikan perubahan, sehingga institusi harus secara proaktif berinvestasi dalam membangun kapital akademik akademisi yang terkait dengan pemahaman mendalam tentang nilai-nilai Islam dan bagaimana nilai-nilai tersebut dapat diintegrasikan dengan disiplin ilmu mereka. Clifford dan Montgomery (2014) menemukan bahwa para peserta dalam kursus tentang internasionalisasi kurikulum mengakui pentingnya "focused leadership" dan "powerful incentives" untuk dosen yang ingin mengembangkan kurikulum, serta perubahan budaya yang sama pentingnya dengan perubahan struktural. Penelitian Lewis et al. (2016) tentang pendidikan lapangan dalam kemitraan universitas-komunitas menunjukkan bahwa kemitraan yang berhasil memerlukan dukungan administratif yang kuat, pembentukan konsorsium lokal yang jelas, dan pendekatan yang fleksibel dan responsif. Implikasi praktis untuk integrasi nilai-nilai Islam adalah

bahwa implementasi memerlukan pengembangan profesional sistematis bagi dosen yang mencakup pengetahuan tentang nilai-nilai Islam dan cara mengintegrasikannya dengan cara yang pedagogis sound dan intelektual rigorous, serta alokasi waktu yang cukup dalam struktur kalender dosen untuk terlibat dalam diskusi dan refleksi berkelanjutan tentang integrasi nilai-nilai.

3. Governance Institusional, Kepemimpinan Akademik, dan Kolaborasi Stakeholder – Fasilitator dan Hambatan di Level Institusional

Pertanyaan penelitian ketiga mengeksplorasi bagaimana governance institusional, kepemimpinan akademik, dan kolaborasi dengan komunitas religius dan stakeholder eksternal memfasilitasi atau menghambat integrasi nilai-nilai Islam dalam kurikulum pendidikan tinggi pada level institusional. Literatur yang ditelaah menunjukkan bahwa reforma kurikulum yang berhasil memerlukan lebih dari sekadar inovasi pedagogis tingkat mikro; hal itu memerlukan dukungan sistemik, keselarasan kebijakan, dan kolaborasi yang

thoughtful di berbagai tingkat organisasi dan antara institusi serta komunitas eksternal (Wimpenny et al., 2019; Franco et al., 2018; Angelaki et al., 2024). Penelitian Wimpenny et al. (2019) dalam proyek OpenMed—kolaborasi lintas budaya antara institusi pendidikan Eropa dan Mediterania Selatan untuk mengintegrasikan praktik pendidikan terbuka—mengidentifikasi bahwa kunci kesuksesan dalam transformasi kurikulum adalah pentingnya "developing cultural awareness" dan "dewesternization approach" yang memerlukan pemahaman mendalam tentang konteks budaya lokal serta negosiasi berkelanjutan tentang makna, nilai, dan implementasi. Penelitian ini menekankan bahwa dewesternisasi bukan hanya tentang mengadopsi perspektif lokal tetapi tentang "co-creation pengetahuan" yang menghargai "indigenous knowledge sebagai reciprocal exchanges of cultural wealth," dengan implikasi signifikan bahwa governance institusional harus menciptakan struktur dan proses yang memfasilitasi co-creation pengetahuan antara institusi akademik dan komunitas religius. Penelitian tentang Higher Education for Sustainable

Development oleh Franco et al. (2018) menemukan bahwa integrasi yang efektif memerlukan pendekatan governance yang terkoordinasi, bukan hanya inisiatif terisolasi, dengan Afrika yang menunjukkan "plethora of scattered activities" yang tidak terkoordinasi, sementara region lain dengan governing approach yang lebih terstruktur menunjukkan integrasi yang lebih sistemik dan bermakna. Penelitian Angelaki et al. (2024) tentang embedding sustainability dalam kurikulum ICT memberikan model konkret bahwa ketika institusi mengadopsi pendekatan sistemik untuk integrasi nilai-nilai—dengan supporting direct human and economic resources, incentivizing dan upskilling staff, dan menciptakan policy frameworks yang jelas—hasil pembelajaran siswa meningkat secara signifikan dan institutional culture bergeser untuk menghargai integrasi nilai-nilai tersebut. Pada tingkat kepemimpinan akademik, Clifford dan Montgomery (2014) menemukan bahwa visible dan consistent leadership dari tingkat institusional adalah penting, dengan komunikasi yang jelas dari institusi tentang mengapa transformasi kurikulum penting, bagaimana hal itu

sejalan dengan misi institusional, dan bagaimana hal itu berkontribusi pada pembelajaran dan pengembangan siswa yang bermakna. Penelitian Lewis et al. (2016) menunjukkan bahwa kolaborasi dengan stakeholder eksternal menghasilkan manfaat signifikan: (1) community input meningkatkan relevansi kurikulum bagi konteks praktis; (2) kolaborasi membantu mengidentifikasi learning outcomes yang lebih nuanced; (3) partnership memfasilitasi komunikasi dua arah antara institusi dan komunitas; dan (4) kolaborasi memperkuat relationships yang menciptakan ekosistem yang lebih integrated untuk preparation siswa. Governance institusional yang efektif akan memerlukan struktur dan proses yang jelas, termasuk establishment of institutional committees dengan representasi dari dosen berbagai disiplin, pemimpin religius, dan administrator akademik; development of institutional policy documents yang mengarticulasi peran nilai-nilai Islam dalam misi institusional; establishment of resource allocation mechanisms; development of quality assurance processes; dan establishment of mechanisms untuk stakeholder feedback dan continuous

improvement. Kolaborasi dengan komunitas religius menjadi kritis, dengan model yang dapat mengambil berbagai bentuk: advisory committees, focus group discussions, co-teaching arrangements, atau partnerships dalam pengembangan case studies dan materials pembelajaran.

4. Learning Outcomes Transformatif – Kontribusi pada Pembelajaran Transformatif, Pengembangan Etika-Spiritual, dan Employability/Civic Engagement

Pertanyaan penelitian keempat mengeksplorasi bagaimana integrasi nilai-nilai religius dalam kurikulum pendidikan tinggi berkontribusi pada transformative learning, pengembangan etika dan spiritual siswa, serta learning outcomes yang bermakna dalam konteks employability, civic engagement, dan citizenship development. Literatur yang ditelaah menunjukkan bahwa pembelajaran transformatif bukan sekadar transferensi informasi tetapi melibatkan perubahan fundamental dalam bagaimana siswa melihat dunia, memahami diri mereka, dan mengaktualisasikan komitmen etika mereka dalam tindakan sosial (Clifford & Montgomery, 2014; Mukhibat et al.,

2024). Penelitian Clifford dan Montgomery (2014) mengidentifikasi bahwa transformative learning memerlukan: (1) discomfort dengan pengetahuan yang ada; (2) masuk ke liminal state di mana siswa berada dalam state of not-knowing yang tidak nyaman; (3) melewati threshold menuju pemahaman baru yang lebih sophisticated; dan (4) integration pengetahuan baru ini ke dalam worldview dan action mereka, dengan pembelajaran ini memerlukan "excellent facilitation skills" dan ability untuk bekerja dengan emosi serta perspective shifts siswa. Penelitian ini juga mengidentifikasi dua perspektif yang berbeda tentang tujuan akhir dari pembelajaran transformatif: beberapa educators melihat tujuannya sebagai siswa menjadi "active global citizens" yang peduli tentang justice, equality, dan social responsibility serta mengambil action berdasarkan nilai-nilai ini, sementara yang lain lebih nyaman dengan endpoint sebagai siswa menjadi "cosmopolitan learners" yang melekat tentang isu-isu global tetapi tanpa agenda aksi yang didorong oleh sekumpulan nilai universal. Penelitian Mukhibat et al. (2024) tentang pengembangan dan evaluasi kurikulum pendidikan

moderasi agama di Ponorogo State Islamic Institute Indonesia menemukan bahwa ketika kurikulum dirancang dengan learning outcomes yang jelas tentang pengetahuan, keterampilan, dan sikap, siswa mencapai hasil pembelajaran yang signifikan dengan skor evaluasi mencapai 81.9, menunjukkan bahwa siswa berhasil mencapai pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk memupuk moderasi, toleransi, dan pemahaman budaya. Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa pembelajaran bermakna tentang nilai-nilai religius memerlukan keterlibatan multisectoral—bukan hanya institusi akademik tetapi juga keluarga, komunitas religius, dan masyarakat yang lebih luas. Dalam konteks employability dan civic engagement, penelitian Magadza (2026) menemukan bahwa employability yang sesungguhnya memerlukan "balanced curriculum" yang mendukung work-readiness, academic integrity, dan civic engagement secara simultan, menunjukkan bahwa integrasi nilai-nilai religius tidak mengurangi employability siswa tetapi malah memperkayanya dengan memberikan

landasan etika yang kuat. Penelitian López (2022) tentang integrasi SDGs dalam kurikulum postgraduate communication menemukan bahwa ketika pembelajaran tentang sustainability and corporate social responsibility diintegrasikan dengan pedagogical approaches kontemporer, siswa tidak hanya meningkat dalam pengetahuan tetapi juga mengembangkan kompetensi praktis dalam mengkomunikasikan tentang isu-isu penting dan mengembangkan engagement strategies dengan stakeholders, dengan 65% siswa mencapai grade ≥ 80 dan 100% employability satu tahun post-graduation. Dalam konteks citizenship development, Clifford dan Montgomery (2014) mengidentifikasi karakteristik dari global citizens yang developed: aware tentang wider world dan memiliki sense tentang peran mereka sebagai world citizens, respect dan value diversity, memiliki pemahaman tentang bagaimana dunia bekerja secara economic, political, social, cultural, technological, dan environmental, outraged tentang social injustice, dan participate dalam dan berkontribusi pada komunitas di berbagai level dari local hingga global. Integrasi nilai-nilai Islam dalam

kurikulum pendidikan tinggi dapat dirancang untuk memfasilitasi pengembangan jenis citizenship ini, dengan penekanan pada bagaimana nilai-nilai Islam tentang justice, mercy, stewardship, dan human dignity berkontribusi pada pemahaman global yang lebih dalam dan commitment terhadap social change. Untuk memastikan bahwa integrasi nilai-nilai religius menghasilkan learning outcomes yang bermakna, diperlukan sistem assessment dan evaluation yang sophisticated yang tidak hanya mengukur knowledge tentang nilai-nilai religius tetapi juga development siswa dalam keterampilan etika, attitudes, dan sustained commitment terhadap action yang aligned dengan nilai-nilai tersebut, dengan kombinasi dari assessment methods—dari traditional exams, reflective essays, hingga project-based assessments—serta longitudinal studies untuk memahami bagaimana learning tentang nilai-nilai religius selama higher education mempengaruhi choices dan actions lulusan setelah graduation.

PEMBAHASAN

Penelitian systematic literature review tentang "Mengintegrasikan Nilai Islam dalam Kurikulum

Perguruan Tinggi: Mekanisme, Governance, dan Pembelajaran Transformatif" mengungkapkan lanskap kompleks tentang bagaimana nilai-nilai religius dapat diintegrasikan secara bermakna dalam pendidikan tinggi modern sambil mempertahankan rigor akademik dan standar internasional. Diskusi ini akan menganalisis temuan penelitian terhadap empat research questions utama, mengeksplorasi signifikansi hasil, kontribusi pada bidang ilmu, serta implikasi dan batasan penelitian.

Integrasi Epistemologis dan Desain Kurikulum Berbasis Nilai

Pertanyaan penelitian pertama mengeksplorasi dimensi epistemologis tentang bagaimana nilai-nilai Islam dapat diintegrasikan tanpa mengorbankan rigor akademik. Berdasarkan systematic literature review, temuan utama menunjukkan bahwa integrasi nilai-nilai religius bukan sekadar penambahan konten atau modul terisolasi, tetapi memerlukan transformasi fundamental dalam pemahaman institusional tentang sifat pengetahuan (episteme) dan landasan ontologis proses pembelajaran. Shay (2015) dalam

analisis komparatifnya tentang reforma kurikulum di Hong Kong dan Afrika Selatan menggunakan kerangka Bernstein dan Legitimation Code Theory, menunjukkan bahwa kurikulum dibangun atas pilihan fundamental tentang apakah basis pencapaian adalah "knower code" (siapa Anda) atau "knowledge code" (apa dan bagaimana Anda mengetahui). Temuan ini sangat relevan untuk integrasi nilai-nilai Islam karena menunjukkan bahwa pilihan tentang bagaimana dan mengapa nilai-nilai religius diintegrasikan akan dipengaruhi oleh pemahaman institusional yang lebih dalam tentang tujuan transformasi pendidikan.

Penelitian Clifford dan Montgomery (2014-2016) tentang pembelajaran transformatif melalui internasionalisasi kurikulum memberikan kerangka yang useful untuk memahami bagaimana integrasi nilai-nilai dapat dilakukan secara sistemik. Mereka mengidentifikasi empat level perubahan yang saling terkait: level institusional, level program, level pedagogis, dan level personal. Kerangka ini menunjukkan bahwa integrasi nilai-nilai Islam harus melibatkan transformasi di semua level secara simultan. Pada level

institusional, institusi pendidikan tinggi harus secara eksplisit mengakui bahwa nilai-nilai Islam adalah bagian integral dari atribut lulusan yang ingin dikembangkan. Pada level program, kurikulum harus dirancang sehingga nilai-nilai Islam terintegrasi secara organik dalam pembelajaran disiplin ilmu, bukan sebagai modul tambahan atau pilihan elektif. Pada level pedagogis, pengajar harus memiliki keterampilan untuk memfasilitasi pembelajaran yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan cara yang menghormati perspektif siswa yang beragam. Pada level personal, siswa harus mengalami transformasi perspektif yang memungkinkan mereka untuk melihat relevansi nilai-nilai Islam dalam konteks kehidupan pribadi dan profesional mereka.

Temuan penting lainnya dari literature review adalah bahwa integrasi nilai-nilai dapat difasilitasi melalui pendekatan "epistemic access"—sebuah konsep yang mengakui bahwa pengetahuan selalu tertanam dalam konteks nilai dan asumsi ontologis tertentu, dan bahwa akses ke pengetahuan yang bermakna memerlukan akses ke berbagai cara pengetahuan dan berbagai kerangka interpretasi dunia.

Penelitian tentang keberlanjutan dalam pendidikan tinggi, khususnya Angelaki et al. (2024), memberikan bukti empiris konkret bahwa nilai-nilai dapat diintegrasikan secara bermakna dalam kurikulum tanpa mengorbankan kualitas akademik. Dalam penelitian mereka tentang embedding sustainability dalam kurikulum ICT, siswa menunjukkan peningkatan signifikan dalam pengetahuan sustainability (dari pre-test 3.40 ± 0.68 ke post-test 4.08 ± 0.71 , dengan Cohen's $d=1$ yang dianggap large effect) dan juga mengembangkan "intention to engage" dengan sustainability issues. Hal ini menunjukkan bahwa integrasi nilai-nilai dapat menghasilkan pembelajaran yang tidak hanya meningkatkan knowledge tetapi juga memfasilitasi perspektif shift yang lebih dalam.

Penelitian Piriyapongpiat et al. (2024) tentang pendekatan berbasis ontologi untuk pengembangan kurikulum juga memberikan insights penting tentang bagaimana teknologi dan sistem manajemen kurikulum yang tepat dapat mendukung integrasi nilai-nilai. Sistem berbasis ontologi yang dikembangkan dalam penelitian ini mencapai precision 83.14% dan

recall 84.84% dalam merepresentasikan komponen kurikulum yang kompleks, menunjukkan bahwa ada tools potensial yang dapat membantu institusi mengintegrasikan berbagai dimensi—termasuk nilai-nilai, kompetensi, dan learning outcomes—ke dalam struktur kurikulum yang koheren dan terukur.

Dalam konteks Indonesia khususnya, penelitian Setiyo et al. (2020) tentang model pengembangan kurikulum pendidikan vokasi memberikan validation bahwa ada ruang yang semakin diakui dalam discourse pendidikan untuk mengintegrasikan "local wisdom" atau bijaksana lokal. Pengakuan eksplisit ini menunjukkan bahwa integrasi nilai-nilai lokal dan religius bukan hanya dimungkinkan tetapi juga semakin dipandang sebagai essential untuk kurikulum yang responsif terhadap kebutuhan konteks Indonesia.

Mekanisme Implementasi dan Agensi Akademik

Pertanyaan penelitian kedua tentang mekanisme yang memfasilitasi atau menghambat implementasi nilai-nilai religius dalam pembelajaran mengungkapkan gap

yang signifikan antara desain kurikulum dan implementasi aktual di kelas. Literature review menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi sangat bergantung pada agensi akademik dan sense of ownership yang dirasakan oleh pengajar.

Penelitian Mendonça et al. (2016) tentang pengenalan pendekatan pembelajaran berpusat siswa di Eduardo Mondlane University Mozambique memberikan ilustrasi yang jelas tentang tantangan implementasi. Meskipun reforma kurikulum dimulai dengan visi yang jelas, dosen tidak merasa memiliki (lack of ownership) reforma tersebut dan mengekspresikan kebutuhan untuk pelatihan dan kondisi material yang lebih baik. Faktor-faktor kontekstual seperti ukuran kelas yang besar, kurangnya fasilitas, dan ketiadaan budaya akademik yang mendukung pembelajaran dialogis menghambat implementasi pendekatan pembelajaran baru. Temuan ini sangat relevan untuk integrasi nilai-nilai Islam karena menunjukkan bahwa pembelajaran religius, seperti pembelajaran transformatif apapun, memerlukan agensi dan ownership yang dirasakan oleh pengajar. Jika dosen tidak

melihat nilai-nilai Islam sebagai relevan dengan disiplin ilmu mereka, atau jika mereka merasa tidak memiliki pelatihan atau support untuk mengintegrasikan nilai-nilai tersebut, maka implementasi akan sulit atau superfisial.

Penelitian Annala dan Mäkinen (2016) tentang *communities of practice* dalam reforma kurikulum memberikan framework yang sangat berguna untuk memahami agensi akademik. Mereka mengidentifikasi dua jenis narasi dalam discourse akademik: narasi dialogis dan narasi reproduktif. Narasi dialogis mencerminkan akademisi yang secara aktif terlibat dalam menegosiasikan dan membentuk kembali perubahan kurikulum dengan cara yang bermakna bagi mereka, seringkali menghubungkan perubahan dengan penelitian dan aspirasi akademis mereka. Sebaliknya, narasi reproduktif mencerminkan akademisi yang melihat perubahan kurikulum sebagai sesuatu yang mengarahkan kepada mereka dari atas tanpa kesempatan untuk meaningful negotiation. Perbedaan ini sangat penting karena narasi dialogis dikaitkan dengan pembelajaran yang lebih bermakna,

inovasi pedagogi yang lebih besar, dan keterlibatan siswa yang lebih tinggi.

Implikasi untuk integrasi nilai-nilai Islam sangat jelas: keberhasilan akan sangat bergantung pada kemampuan institusi untuk menciptakan ruang bagi akademisi untuk secara aktif terlibat dalam negosiasi tentang bagaimana nilai-nilai Islam harus dipahami, diartikulasikan, dan diintegrasikan dalam konteks disiplin ilmu mereka. Penelitian lanjutan Annala et al. (2020) menggunakan konsep Bourdieu tentang field, habitus, dan capital untuk menganalisis evolusi agensi akademik, menunjukkan bahwa agensi akademik tidak statis tetapi berevolusi selama proses reforma. Persepsi akademisi tentang capital mereka (keterampilan, pengetahuan, status) mempengaruhi bagaimana mereka menegosiasikan perubahan. Dalam konteks integrasi nilai-nilai Islam, ini menunjukkan bahwa institusi harus secara proaktif berinvestasi dalam membangun kapital akademik akademisi yang terkait dengan pemahaman mendalam tentang nilai-nilai Islam.

Penelitian Clifford dan Montgomery (2014) mengidentifikasi

pentingnya "focused leadership" dan "powerful incentives" untuk dosen yang ingin mengembangkan kurikulum. Mereka juga menekankan bahwa perubahan budaya sama pentingnya dengan perubahan struktural. Ini menunjukkan bahwa implementasi integrasi nilai-nilai Islam memerlukan kepemimpinan yang jelas dan konsisten dari tingkat institusional, insentif yang jelas dan meaningful bagi dosen, serta budaya institusional yang mengakui dan merayakan integrasi nilai-nilai religius.

Pada tingkat praktis, mekanisme implementasi yang berhasil memerlukan: (1) pengembangan profesional sistematis bagi dosen tentang nilai-nilai Islam dan bagaimana mengintegrasikannya dengan cara yang pedagogis sound; (2) alokasi waktu yang cukup dalam struktur kalender dosen untuk diskusi dan refleksi berkelanjutan; (3) sistem reward dan recognition yang mengakui kontribusi dosen; dan (4) mekanisme feedback yang memungkinkan dosen untuk regular reflection dan adjustment.

Governance Institusional dan Kolaborasi Stakeholder

Pertanyaan penelitian ketiga tentang governance institusional, kepemimpinan akademik, dan kolaborasi stakeholder mengungkapkan bahwa reforma kurikulum yang berhasil memerlukan lebih dari sekadar inovasi pedagogis tingkat mikro. Hal tersebut memerlukan dukungan sistemik, keselarasan kebijakan, dan kolaborasi yang thoughtful di berbagai tingkat organisasi.

Penelitian Wimpenny et al. (2019) tentang proyek OpenMed—kolaborasi lintas budaya antara institusi pendidikan Eropa dan Mediterania Selatan—memberikan insights penting tentang pentingnya "developing cultural awareness" dan apa yang mereka sebut "dewesternization approach." Penelitian ini menemukan bahwa kunci kesuksesan dalam transformasi kurikulum adalah pemahaman mendalam tentang konteks budaya lokal dan negosiasi berkelanjutan tentang makna, nilai, dan implementasi. Lebih penting lagi, penelitian menekankan bahwa dewesternisasi bukan hanya tentang mengadopsi perspektif lokal tetapi tentang "co-creation pengetahuan" yang menghargai indigenous

knowledge sebagai reciprocal exchanges of cultural wealth. Implikasi untuk integrasi nilai-nilai Islam sangat signifikan: governance institusional harus menciptakan struktur dan proses yang memfasilitasi co-creation pengetahuan antara institusi akademik dan komunitas religius, dengan menghormati wisdom religius sebagai equal dengan perspektif akademis secular.

Penelitian Franco et al. (2018) tentang Higher Education for Sustainable Development memberikan insights tentang pentingnya governing approach yang terkoordinasi. Mereka menemukan bahwa di Afrika, di mana tidak ada governing approach yang jelas, terjadi "plethora of scattered activities" yang tidak terkoordinasi, sementara di region lain dengan governing approach yang lebih terstruktur, integrasi lebih sistemik dan bermakna. Ini menunjukkan bahwa untuk integrasi nilai-nilai Islam yang efektif, institusi pendidikan tinggi memerlukan "governing approach" yang jelas—yaitu keputusan dan kebijakan institusional yang eksplisit tentang peran nilai-nilai Islam.

Penelitian Angelaki et al. (2024) memberikan model konkret tentang

bagaimana governing approach dapat menghasilkan implementasi yang berhasil. Ketika institusi mengadopsi pendekatan sistemik untuk integrasi sustainability—dengan supporting direct human and economic resources, incentivizing dan upskilling staff, dan menciptakan policy frameworks yang jelas—hasil pembelajaran siswa meningkat signifikan dan institutional culture bergeser untuk menghargai integrasi. Model ini dapat diterapkan pada integrasi nilai-nilai Islam.

Pada tingkat kepemimpinan akademik, Clifford dan Montgomery (2014) menemukan bahwa visible dan consistent leadership dari tingkat institusional adalah penting, dengan komunikasi yang jelas tentang mengapa transformasi kurikulum penting dan bagaimana hal itu sejalan dengan misi institusional. Kolaborasi dengan stakeholder eksternal, khususnya komunitas religius, adalah kritis. Lewis et al. (2016) menemukan bahwa dalam kemitraan universitas-komunitas, keterlibatan komunitas menghasilkan manfaat signifikan: (1) community input meningkatkan relevansi kurikulum; (2) kolaborasi membantu mengidentifikasi learning outcomes yang lebih nuanced; (3)

partnership memfasilitasi komunikasi dua arah; dan (4) kolaborasi memperkuat relationships yang menciptakan ekosistem yang lebih integrated.

Governance institusional yang efektif akan memerlukan struktur dan proses yang jelas, termasuk: (1) establishment of institutional committees dengan representasi dari dosen berbagai disiplin, pemimpin religius, dan administrator akademik; (2) development of institutional policy documents yang articulate peran nilai-nilai Islam; (3) establishment of resource allocation mechanisms; (4) development of quality assurance processes; dan (5) establishment of mechanisms untuk stakeholder feedback dan continuous improvement.

Learning Outcomes Transformatif dan Pengembangan Bermakna

Pertanyaan penelitian keempat tentang bagaimana integrasi nilai-nilai religius berkontribusi pada pembelajaran transformatif, pengembangan etika-spiritual, dan learning outcomes bermakna mengungkapkan bahwa pembelajaran transformatif bukan sekadar transferensi informasi tetapi

melibatkan perubahan fundamental dalam bagaimana siswa melihat dunia.

Clifford dan Montgomery (2014) mengidentifikasi bahwa pembelajaran transformatif memerlukan: (1) discomfort dengan pengetahuan yang ada; (2) masuk ke liminal state; (3) melewati threshold menuju pemahaman baru; dan (4) integration pengetahuan baru ke dalam worldview dan action. Mereka juga mengidentifikasi bahwa ada dua perspektif yang berbeda tentang pembelajaran transformatif: beberapa educators melihat tujuannya sebagai siswa menjadi "active global citizens" yang mengambil tindakan mengenai injustice, sementara yang lain lebih nyaman dengan endpoint sebagai siswa menjadi "cosmopolitan learners" yang melek tetapi tanpa agenda aksi yang didorong oleh nilai universal.

Implikasi untuk integrasi nilai-nilai Islam sangat signifikan. Integrasi dapat dirancang untuk memfasilitasi pembelajaran transformatif yang tidak hanya mengubah perspektif siswa tetapi juga mendorong mereka untuk mengambil action berakar dalam komitmen etika dan spiritual yang mendalam. Namun, hal ini harus

dilakukan dengan cara yang menghormati agency siswa, dengan transparansi tentang nilai-nilai yang diintegrasikan, dan dengan sensitivitas terhadap diversity perspektif religius siswa.

Penelitian Mukhibat et al. (2024) tentang pengembangan dan evaluasi kurikulum pendidikan moderasi agama di Ponorogo State Islamic Institute memberikan bukti empiris konkret bahwa integrasi nilai-nilai religius dapat menghasilkan learning outcomes yang bermakna. Siswa mencapai skor evaluasi 81.9, menunjukkan keberhasilan dalam mencapai pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk memupuk moderasi, toleransi, dan pemahaman budaya. Namun, penelitian ini juga mengungkapkan bahwa pembelajaran bermakna tentang nilai-nilai religius memerlukan keterlibatan multisectoral—bukan hanya institusi akademik tetapi juga keluarga, komunitas religius, dan masyarakat yang lebih luas.

Dalam konteks employability, penelitian Magadza (2026) menemukan bahwa employability yang sesungguhnya memerlukan "balanced curriculum" yang

mendukung work-readiness, academic integrity, dan civic engagement secara simultan. Ini menunjukkan bahwa integrasi nilai-nilai Islam tidak mengurangi employability siswa tetapi malah memperkayanya dengan memberikan landasan etika yang kuat. Penelitian López (2022) tentang integrasi SDGs dalam kurikulum postgraduate communication menunjukkan bahwa ketika pembelajaran tentang sustainability diintegrasikan dengan pedagogical approaches kontemporer, siswa tidak hanya meningkat dalam pengetahuan tetapi juga mengembangkan kompetensi praktis dan commitment berkelanjutan terhadap social responsibility (100% employability satu tahun post-graduation).

Dalam konteks citizenship development, integrasi nilai-nilai Islam dapat dirancang untuk memfasilitasi pengembangan global citizens yang tidak hanya aware tentang isu-isu global tetapi juga committed terhadap social justice. Clifford dan Montgomery (2014) mengidentifikasi karakteristik global citizens: (1) aware tentang wider world, (2) respect dan value diversity, (3) pemahaman tentang bagaimana dunia bekerja, (4)

outraged tentang social injustice, dan (5) participate dalam komunitas di berbagai level. Integrasi nilai-nilai Islam dapat dirancang untuk memfasilitasi pengembangan jenis citizenship ini, dengan penekanan pada bagaimana nilai-nilai Islam tentang justice, mercy, stewardship, dan human dignity berkontribusi pada pemahaman global yang lebih dalam.

D. Kesimpulan

Penelitian systematic literature review ini telah mengeksplorasi bagaimana nilai-nilai Islam dapat diintegrasikan dalam kurikulum pendidikan tinggi melalui empat pertanyaan penelitian utama yang dapat disimpulkan sebagai berikut.

Pertama, integrasi nilai-nilai Islam dalam kurikulum pendidikan tinggi adalah mungkin dilakukan tanpa mengorbankan rigor akademik dan standar internasional. Integrasi ini bukan sekadar penambahan konten terisolasi, melainkan transformasi epistemologis yang mengakui bahwa pengetahuan selalu tertanam dalam konteks nilai dan asumsi ontologis tertentu. Dengan memanfaatkan pendekatan desain kurikulum yang sistemik, teknologi manajemen kurikulum berbasis ontologi, dan

model pembelajaran multidisiplin, nilai-nilai Islam dapat menjadi prinsip integratif yang membentuk keseluruhan struktur kurikulum sambil memperkaya rigor akademik melalui konteks etika dan spiritual yang jelas.

Kedua, implementasi efektif dari integrasi nilai-nilai Islam memerlukan penciptaan ruang bagi agensi akademik. Pengajar harus secara aktif terlibat dalam negosiasi tentang bagaimana nilai-nilai Islam dapat dipahami dan diintegrasikan dalam disiplin ilmu mereka, bukan hanya menerima direktif dari atas. Ini memerlukan investasi signifikan dalam pengembangan profesional dosen, pengakuan akan pentingnya waktu dan sumber daya untuk perubahan, serta sistem insentif yang mendukung integrasi bermakna nilai-nilai Islam dalam pembelajaran dan pengajaran.

Ketiga, governance institusional yang terkoordinasi, kepemimpinan akademik yang jelas, dan kolaborasi aktif dengan komunitas religius adalah fondasi kesuksesan. Tidak cukup dengan inisiatif terpisah atau grassroots; diperlukan keputusan dan kebijakan institusional yang eksplisit tentang peran nilai-nilai Islam, alokasi sumber daya yang memadai,

mekanisme quality assurance yang kuat, dan struktur kolaborasi yang thoughtful dengan pemimpin religius dan komunitas.

Keempat, integrasi nilai-nilai Islam dalam kurikulum berkontribusi signifikan pada pembelajaran transformatif, pengembangan etika dan spiritual siswa, serta learning outcomes yang bermakna. Ketika dirancang dengan cermat dengan learning outcomes yang jelas, siswa tidak hanya mengembangkan pengetahuan dan keterampilan teknis tetapi juga komitmen etika dan spiritual yang mendalam terhadap penggunaan keahlian mereka untuk social good. Integrasi ini menghasilkan lulusan yang memiliki employability lebih baik, civic engagement yang lebih kuat, dan sense of citizenship yang lebih dalam yang didasarkan pada nilai-nilai etika dan kemanusiaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alberdi, E., Alvarez, I., Eguia, I., Etxeberria, P., Garcia, M. J., & Perez, H. (2021). A multidisciplinary approach for the sustainable development of the civil engineering curricula. *Sustainability*, 13(4), 1-15.
- Alenezi, A. M., Alruwaili, F. F., Alenezi, M., & Thabet, M. (2023). Technology knowledge inclusion in higher education curriculums: The necessity toward sustainable development in Saudi Arabia. *Sustainability*, 15(3), 1-18.
- Angelaki, M. E., Bersimis, F., Karvounidis, T., & Douligeris, C. (2023). Towards more sustainable higher education institutions: Implementing the sustainable development goals and embedding sustainability into the information and computer technology curricula. *Education and Information Technologies*, 28(5), 5079-5110.
- Annala, J., & Makinen, M. (2016). Communities of practice in higher education: Contradictory narratives of a university-wide curriculum reform. *Studies in Higher Education*, 41(11), 1945-1960.
- Annala, J., Makinen, M., Lindén, J., & Henriksson, J. (2020). Change and stability in a cademic agency in higher education curriculum reform. *Higher Education*, 80(5), 901-919.
- Asante, M. K. (2020). Toward a transformative African curriculum for higher education. *Journal of Black Studies*, 51(5), 439-459.
- Bakah, M. A. B., Voogt, J. M., & Pieters, J. M. (2011). Curriculum reform and teachers training needs: The case of higher education in Ghana. *Journal of Curriculum Studies*, 43(4), 479-503.
- Chen, Y., Li, S., & Chen, R. (2025). Impact of industry and education integration on employment quality in higher vocational colleges: Moderating role of faculty qualifications and curriculum dev

- elopment capacity. *Education and Training*, 67(2), 201-220.
- Chiapello, L. (2017). A case of values conflict in the video game design field: A critique of Schön's appreciative system. *Design Studies*, 51, 54-78.
- Clifford, V., & Montgomery, C. (2014). Transformative learning through internationalization of the curriculum in higher education. *Journal of Transformative Education*, 12(4), 347-366.
- Cui, J. (2021). The impact of entrepreneurship curriculum with teaching models on sustainable development of entrepreneurial mindset among higher education students in China. *Sustainability*, 13(16), 1-18.
- Dehing, F., Jochems, W., & Baartman, L. (2013). Development of an engineering identity in the engineering curriculum in Dutch higher education: An exploratory study from the teaching staff perspective. *European Journal of Engineering Education*, 38(4), 361-374.
- Dracup, M., Austin, J. E., & King, T. J. (2018). Applying cultural-historical activity theory founders and the development of inclusive curriculum practices in higher education. *International Journal of Inclusive Education*, 22(5), 493-509.
- Ebewo, P. J., & Sirayi, H. M. (2018). Curriculum transformation in a post-apartheid South African university: The arts faculty, Tshwane University of Technology. *South African Journal of Higher Education*, 32(5), 123-140.
- Gilder, E. (2011a). Less developed countries (LDCs) facing higher education curricula reform challenges in a 'new world (dis)order'. *Higher Education Studies*, 1(1), 2-12.
- Gilder, E. (2011b). The status and challenges of higher education curricula reforms in four highly developed regional/national settings. *International Journal of Educational Development*, 31(3), 245-254.
- Higdon, R. D. (2016). Employability: The missing voice: How student and graduate views could be used to develop future higher education policy and inform curricula. *Higher Education Policy*, 29(3), 371-392.
- Lewis, L. A., Kusmaul, N., Elze, D., & Butler, L. (2016). The role of field education in a university-community partnership aimed at curriculum transformation. *Journal of Social Work Education*, 52(4), 423-435.
- López, B. (2022). How higher education promotes the integration of sustainable development goals—An experience in the postgraduate curricula. *International Journal of Sustainability in Higher Education*, 23(5), 1128-1145.
- Lozano, R., & Barreiro-Gen, M. (2019). Analysing the factors affecting the incorporation of sustainable development into European higher education institutions' curricula. *Journal of Cleaner Production*, 235, 1337-1349.
- Magadza, I. (2026). Integrating curriculum reform, faculty development, and graduate employability in South Africa's higher education:

- A qualitative study in the Fourth Industrial Revolution. *Journal of Education and Work*, 39(1), 55-72.
- Maimela, C., & Mbondo, P. (2025). Artificial intelligence in South African universities: Curriculum transformation and decolonisation—aid or obstacle? *Education and Information Technologies*, 30(2), 189-210.
- Mendonça, M., Popov, O., Frånberg, G.-M., & Cossa, E. (2012). Introducing a student-centred learning approach in current curriculum reform in Mozambican higher education. *Education Inquiry*, 3(3), 421-442.
- Mukhibat, M., Effendi, M., Setyawan, W. H., & Sutoyo, M. (2024). Development and evaluation of religious moderation education curriculum at higher education in Indonesia. *Heliyon*, 10(3), e25487.
- Nhemachena, A. (2024). Curriculum transformation for the futuristic worlds: Design anthropology for twenty-first century African universities. *Anthropology Southern Africa*, 47(1), 1-17.
- Piriyapongpipat, P., Goldin, S., & Ditchaen, N. (2024). An alternative approach to ontology-based curriculum development in higher education. *Education and Information Technologies*, 29(4), 4567-4590.
- Setiyo, M., Waluyo, B., Suryawan, A., Triyono, M. B., & Murniati, D. E. (2020). Alternative model of curriculum development for vocational higher education: Indonesian perspective. *International Journal of Instruction*, 13(4), 789-806.
- Shay, S. (2015). Curriculum reform in higher education: A contested space. *Teaching in Higher Education*, 20(6), 622-635.
- Thekdi, S. A., & Aven, T. (2021). Risk science in higher education: The current and future role of risk science in the university curriculum. *Risk Analysis*, 41(12), 2247-2260.
- Wimpenny, K., Nascimbeni, F., Affouneh, S., et al. (2019). Using open education practices across the Mediterranean for intercultural curriculum development in higher education. *Open Praxis*, 11(3), 245-261.
- Yin, K., & De Maio, C. (2022). Transformative, troublesome and liminal: Does the presentation of legal reasoning in the legal studies curricula in higher education institutions satisfy the characteristics of a threshold concept? *The Law Teacher*, 56(2), 205-222.